

---

## **MANFAAT AKUNTANSI BASIS AKRUAL: STUDI KASUS PADA ENTITAS PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, INDONESIA**

**Ansharullah Tasri**

Universitas Sulawesi Barat

Email: Ansharullah.tarsi@gmail.com

---

### **ABSTRACT**

---

*Pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, posisi keuangan pemerintah daerah dan perubahannya serta bagaimana pemerintah daerah mendanai kegiatannya dapat diidentifikasi dan diukur secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat akuntansi akrual. Terdapat lima indikator yang digunakan untuk menilai tingkat manfaat yaitu penilaian kinerja, pelayanan publik, kebutuhan arus kas, alokasi sumber daya, dan kewajiban akuntabilitas. Masih sedikit literatur yang menjelaskan tentang manfaat informasi akrual di Pemerintah Indonesia. Hal itu dikarenakan kewajiban pelaksanaan akuntansi akrual baru berlaku untuk periode pelaporan 2015. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengeksplorasi manfaat akuntansi akrual pada internal pemerintah. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui manfaat akun-akun akrual terhadap kinerja pemerintah. Responden yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 80 orang yaitu sekretaris dan kepala sub bagian keuangan yang ada pada 40 SKPD/OPD pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan dengan jawaban skala likert 1-5 atau pada kategori paling rendah sangat tidak bermanfaat dan pada kategori paling tinggi sangat bermanfaat. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi akrual bermanfaat berdasarkan penilaian terhadap lima indikator yang terdapat pada penelitian ini.*

**Keywords:** *Manfaat Akuntansi Akrual, Penilaian Kinerja, Pelayanan Publik, Kebutuhan Arus Kas, Alokasi Sumber Daya, Kewajiban Akuntabilitas.*

---

### **LATAR BELAKANG**

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mewajibkan seluruh instansi pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan menggunakan basis akrual. Pengadopsian akuntansi akrual merupakan tendensi organisasi publik untuk tujuan

(a) kemudahan dalam administrasi, (b) implementasi manajemen yang baik, motivasi untuk perubahan, dan (d) meningkatkan pengelolaan keuangan dan kinerja sektor publik (Carlin, 2005). Informasi berbasis akrual diklaim bisa menghasilkan informasi untuk alokasi sumber daya yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan efisiensi dan menilai kinerja (Mellor, 1996; Ryan, 1998; Pallot, 2001;

Barrett, 2004; van der Hoek, 2005). Tujuan utama laporan keuangan ialah menyediakan informasi berkualitas tinggi mengenai posisi dan kinerja keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi para *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan (IAS 1, 2015). Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah mencanangkan penerapan laporan keuangan basis akrual.

Proses pengambilan keputusan publik yang semakin terdesentralisasi memaksa manajer publik menyusun laporan keuangan yang relevan dan reliabel untuk memperoleh informasi yang akurat bagi pengambil keputusan. Akuntansi akrual dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan serta mampu menyajikan informasi yang lebih baik dalam rangka pengambilan keputusan (Kober *et al*, 2010). Sedangkan menurut Simanjuntak (2010) manfaat implementasi akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah yakni dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah.

Salah satu hasil studi International Federation of Accounting (IFAC) Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, posisi keuangan pemerintah daerah dan perubahannya serta bagaimana pemerintah daerah mendanai kegiatannya dapat diidentifikasi dan diukur secara tepat. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Halim dan Kusufi (2014) yang menyatakan bahwa manfaat SAP berbasis akrual antara lain adalah meningkatkan keterbandingan (*comparability*) antar laporan keuangan pemerintah. Perubahan sistem ini juga bertujuan menjadikan laporan keuangan kementerian dan lembaga mendapat pengakuan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (cnnindonesia.com). Dengan perubahan ini juga dianggap akan tidak ada lagi peluang penggelapan. Sebagai gambaran, pada masa lalu, setiap kementerian atau lembaga nonkementerian dapat mengajukan anggaran yang sama secara berulang-ulang pada APBN (ekonomi.kompas.com). Terlepas dari manfaat yang didapatkan, basis akrual masih menimbulkan pro dan kontra dalam penerapannya sejak dulu.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya pro dan kontra dalam penerapan akuntansi akrual ini, beberapa penelitian mengungkapkan pandangan kritis tentang pengadopsian akuntansi berbasis akrual (Guthrie, 1993; Jones dan Puglisi, 1997; Ma dan Matthews, 1993; McCrae dan Aiken, 1994; Mellett, 1997; dan Walker, 1988). Namun, banyak juga penelitian yang mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual (Barrett, 1993; Evans, 1997; Gillibrand dan Hilton, 1998; Heald dan Georgiou, 1995; Rowles, 1992, 1993 dan 2002; dan Talbot, 1998). Beberapa yang mengkritisi penerapan akuntansi akrual pada sektor publik menganggap bahwa pengadopsian sistem akuntansi berbasis akrual yang telah berhasil pada sektor swasta tidak tepat karena dari segi tujuan, sektor swasta dan sektor publik berbeda. Sektor swasta menjalankan usaha dalam rangka mencari laba sementara sektor publik bertujuan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY berbasis *cash toward accrual* telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas sejak tahun 2010 dan 2011 serta Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012 dan 2013. Selain itu pemerintah daerah DIY juga telah menjalankan strategi penerapan akuntansi berbasis akrual sebelum Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah daerah DIY menjadi relevan untuk dijadikan objek penelitian karena telah melakukan persiapan-persiapan dalam melaksanakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Masih sedikit literatur yang menjelaskan tentang manfaat informasi akrual di Pemerintah Indonesia. Hal itu dikarenakan kewajiban pelaksanaan akuntansi akrual baru berlaku untuk periode pelaporan 2015. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengeksplorasi manfaat akuntansi akrual pada internal pemerintah.

## KERANGKA TEORI

Pemenuhan kebutuhan pimpinan pemerintahan dalam hal ini birokrat terhadap manajer publik tentunya diharapkan bisa terlaksana dengan baik. Salah satu aspek yang penting untuk terlaksananya kebutuhan pimpinan adalah dengan dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan oleh manajer publik. Pengelolaan keuangan yang baik menggambarkan kinerja manajer sektor publik yang baik pula. Upaya untuk menjadikan pengelolaan keuangan yang lebih baik, tentunya dibutuhkan suatu penerapan sistem pelaporan keuangan yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan akuntansi basis akrual. Penerapannya tentunya diharapkan akan memperoleh dapat memberi manfaat terhadap pemerintah. Teori akuntansi positif menjelaskan penerapan akuntansi akrual sebagai pemenuhan kebutuhan politisi dan birokrat untuk pengendalian eksternal terhadap manajer di sektor publik (Pina et al, 2009).

Teori akuntansi positif ini berkembang karena adanya ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif (Watt dan Zimmerman, 1986). Selain itu akuntansi normatif juga dianggap terlalu sederhana untuk menganalisa teori akuntansi. Oleh karena itu teori akuntansi positif dikembangkan agar dapat menjelaskan atau menganalisa teori akuntansi dengan baik. Watt dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa teori akuntansi positif dikembangkan untuk orientasi pada penelitian empirik. Menurut Godfrey et al (2010) dari sudut pandang ekonomi, teori akuntansi positif berusaha menjawab apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh dalam pemilihan metode akuntansi alternatif, apakah biaya yang diperoleh sebanding dengan manfaat yang diperoleh dalam regulasi dan proses penentuan standar akuntansi, dan apa dampak laporan keuangan yang dipublikasikan pada harga saham. Teori akuntansi positif berkaitan dengan prediksi tindakan sebagaimana pilihan atas kebijakan akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana manajer akan merespons terhadap akuntansi baru tersebut (Scott, 2003).

Dari penjelasan di atas *positive accounting theory* menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini karena teori akuntansi positif berusaha menjelaskan apakah akuntansi akrual bermanfaat dalam kondisi-kondisi dalam suatu organisasi atau tidak. Teori akuntansi positif juga mengasumsikan bahwa pemilihan akuntansi dipengaruhi oleh kekuatan relatif antara agen dan prinsipal yang bertindak demi kepentingan mereka

sendiri (Watts dan Zimmerman, 1978). Dalam sektor publik tentunya pemilihan akuntansi ini ditentukan oleh pemerintah pusat yang dituangkan dalam undang-undang. Pemilihan ini tentunya diharapkan akan menjadi solusi dalam menghadapi masalah-masalah yang ada.

### *Kerangka Penelitian*

Pemilihan metode akuntansi yang baru dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih dari metode yang digunakan sebelumnya. Selain itu pemilihan metode akuntansi yang baru juga dilakukan untuk menambah transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kober et al (2010) dan Andriani et al (2010) telah membagi ke dalam 5 indikator untuk menilai manfaat laporan keuangan diantaranya adalah penilaian kinerja, pelayanan publik, kebutuhan arus kas, alokasi sumber daya, dan kewajiban akuntabilitas.

Manfaat dari indikator-indikator tersebut telah disebutkan dalam PP 71 tahun 2010. Salah satu laporan yang terdapat pada akuntansi akrual bermanfaat menginformasikan mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Laporan akuntansi akrual juga bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah untuk menjalankan pelayanan (PP 71 tahun 2010). Indikator kebutuhan arus kas juga digunakan dalam menilai manfaat akuntansi akrual karena dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah. Penilaian alokasi sumber daya digunakan dalam penelitian ini karena menurut PP 71 tahun 2010 manfaat akuntansi akrual salah satunya adalah menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan. Indikator yang terakhir digunakan dalam penelitian ini adalah kewajiban akuntabilitas karena akuntansi akrual bermanfaat menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (PP 71 tahun 2010).

Manfaat akuntansi akrual dapat diidentifikasi dengan penilaian menggunakan 5 indikator yang telah dijelaskan di atas. Manfaat akuntansi akrual diharapkan bisa menjawab kebutuhan pimpinan pemerintah terhadap manajer sektor publik. Manfaat dari akuntansi akrual dapat digunakan oleh pimpinan birokrat dalam mengawasi kinerja manajer sektor publik. Teori akuntansi positif digunakan dalam menjelaskan hasil penelitian ini.

### **Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual**

Pada basis kas ditemukan berbagai kelemahan dalam penerapannya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan atas penerapan akuntansi berbasis akrual dengan harapan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada basis kas. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrual yang dituliskan dalam Study No. 14 yang diterbitkan oleh International

Public Sector Accounting Standards Board (2011) diantaranya adalah pengguna dapat menilai akuntabilitas untuk pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut, informasi akuntansi akrual dapat menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas dan informasi akuntansi akrual dapat digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Manfaat yang telah dijelaskan di atas kemudian dijelaskan lagi secara detail dalam Study No. 4. Manfaat yang dijelaskan lebih ditekankan pada manfaat pada sektor publik. Adapun manfaat yang dijelaskan yaitu (1) menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas- aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya, (2) memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas- aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmennya, (3) menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya, (4) memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya, (5) bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu mengenai manfaat dari penerapan akuntansi berbasis akrual telah banyak dilakukan di beberapa negara yang telah lebih dahulu menerapkan akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini merujuk pada penelitian negara-negara yang telah menerapkan basis akrual khususnya pada penelitian yang berfokus pada menilai manfaat informasi akrual. Seperti penelitian Kober et al (2010) yang menjelaskan perbedaan persepsi manfaat informasi akuntansi akrual pada organisasi sektor publik di Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas yang mana konsisten dengan temuannya mengenai kegunaan pengambilan keputusan atas informasi keuangan yang dihasilkan berdasarkan tiga sistem akuntansi. Andriani et al (2010) menjelaskan manfaat informasi akuntansi akrual sektor publik di Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan dari manajer sektor publik menunjukkan akuntansi berbasis akrual lebih berguna daripada akuntansi berbasis kas dalam pengambilan keputusan. Hoek, M.P. van der. (2005) menjelaskan manfaat laporan keuangan untuk pengambilan keputusan internal di Belanda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual di Belanda membantu pemerintah dalam meningkatkan transparansi dalam tujuannya terhadap proses pengambilan keputusan.

Di Indonesia masih sedikit literatur yang menjelaskan tentang manfaat dari akuntansi akrual hal ini dikarenakan penerapannya secara penuh masih tergolong baru yaitu dimulai pada tahun 2015. Penelitian tentang akuntansi berbasis akrual di Indonesia kebanyakan meneliti tentang bagaimana persiapan, peralihan, dan pengimplementasiannya. Salah satu penelitian yang dilakukan di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh Mir dkk (2018) yang menyatakan bahwa penerapan basis kas dan akrual dapat meningkatkan transparansi namun kurangnya SDM akuntan dan rendahnya tingkat penggunaan laporan

keuangan dalam pengambilan keputusan menjadi suatu masalah dalam penerapannya. Penelitian ini diharapkan bisa menambah bukti empiris tentang manfaat akuntansi berbasis akrual di Indonesia khususnya pada internal Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kober, et al (2010) tentang manfaat informasi laporan keuangan. Selain itu penelitian ini juga mengidentifikasi tujuh akun akrual.

## **METODE PENELITIAN**

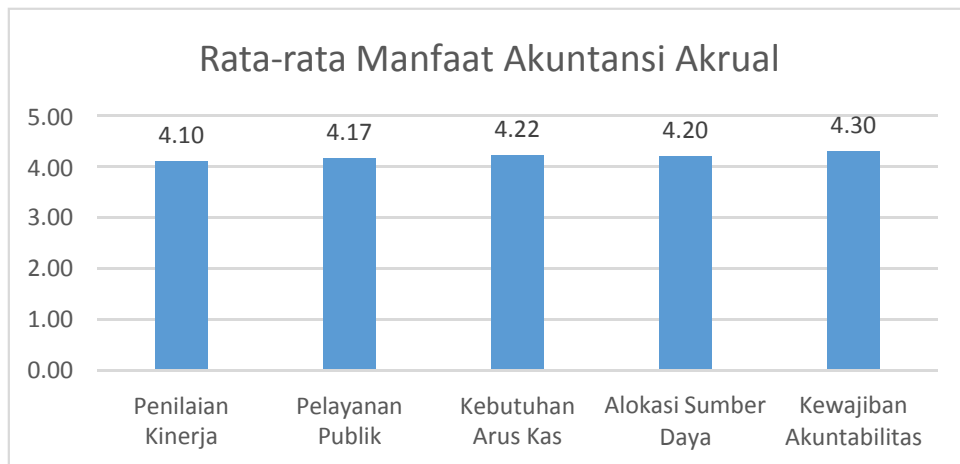
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan survei menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Menurut Sugiyono (2014) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih dari satu variabel yang disebut dengan variabel yang berdiri sendiri tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan variabel satu dengan lainnya. Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner dengan menggunakan skala likert 1-5. Kuesioner dibagi ke dalam dua bagian yaitu bagian pertama digunakan untuk memperoleh data demografi atau profil dari responden, sedangkan bagian kedua digunakan untuk memperoleh data untuk model penelitian.

Subyek yang dipilih dalam penelitian ini adalah lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan pemilihan subyek penelitian ini, maka populasi pada penelitian ini adalah entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang tidak akurat dan tidak tepat akan memberikan kesimpulan riset yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau dapat menimbulkan kesimpulan salah yang menyesatkan (Hartono, 2004). Penelitian ini terdapat 80 sampel penelitian yang terdiri dari pejabat kepala bagian keuangan dan pejabat sekretaris dari 40 instansi pemerintahan yang ada di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 40 instansi tersebut merupakan rekomendasi BAKESBANGPOL.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Manfaat Akuntansi Akruwal Pada Pemerintah Provinsi DIY**

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis terhadap manfaat akuntansi akrual dalam pengambilan keputusan internal. Adapun indikator yang digunakan adalah manfaat akuntansi akrual dalam penilaian kinerja, pelayanan publik, kebutuhan arus kas, alokasi sumber daya, kewajiban akuntabilitas (Kober et al (2010), dan Andriani et al (2010)). Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 1 - 5 di mana angka satu berarti sangat tidak bermanfaat dan angka lima sangat bermanfaat.

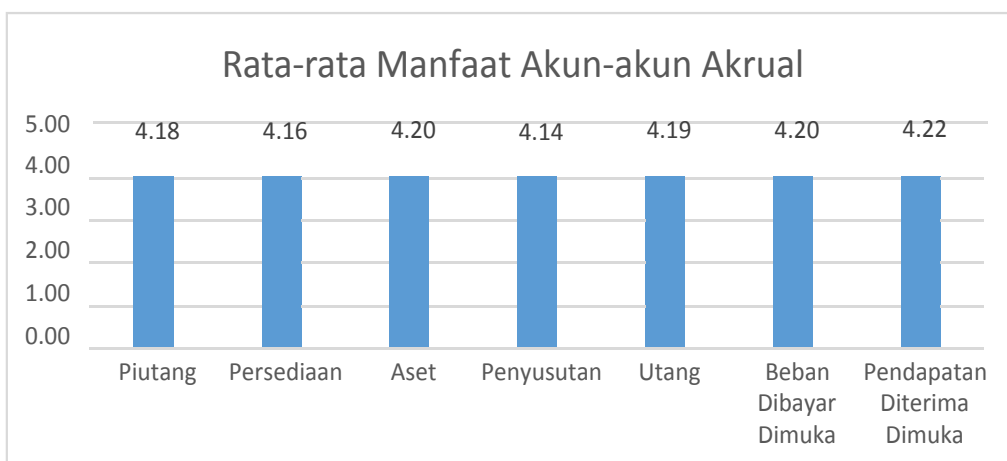


**Gambar 1.** Rata-rata manfaat akuntansi akruaI per indikator penelitian

Secara keseluruhan rata-rata jawaban responden menunjukkan bahwa akuntansi akruaI bermanfaat. Penilaian kinerja dengan rata-rata 4,10, pelayanan publik 4,17, kebutuhan arus kas 4,22, alokasi sumber daya 4,20, dan kewajiban akuntabilitas 4,30. Untuk mengetahui manfaat lebih jauh, berikut dijelaskan manfaat akun-akun akruaI.

### Manfaat Akun-akun AkruaI

Pada analisis manfaat akun-akun akruaI, telah dipetakan tujuh akun akruaI yang berkaitan langsung dengan pertanyaan pada kuesioner, kemudian dikumpulkan rata-rata jawaban per akunnnya. Berikut disajikan rata-rata manfaat akun-akun akruaI pada gambar 2.



**Gambar 2.** Rata-rata manfaat akun-akun akruaI

### *Piutang*

Akuntansi akruaI bermanfaat dalam menilai kemampuan pemerintah untuk terus menyediakan pelayanan. Jika dikaitkan dengan akun piutang hal ini berindikasi bahwa semakin banyak perputaran piutang menunjukkan bahwa pelayanan pada pemerintah



berjalan secara terus menerus. Adanya akun piutang menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah berjalan dengan baik. Berdasarkan jawaban responden dan dikaitkan dengan fungsi akun piutang, pada indikator pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan pemerintah berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Selain itu akuntansi akrual bermanfaat dalam memprediksi kebutuhan kas. Akun piutang merupakan potensi pendapatan yang bisa diperoleh pada masa mendatang. Dengan adanya informasi piutang pemerintah dapat memprediksi kebutuhan kas untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Jika dikaitkan dengan jawaban responden akun piutang bermanfaat dalam memprediksi kebutuhan kas karena piutang merupakan potensi pendapatan kas di masa mendatang.

#### ***Persediaan/Barang Habis Pakai***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam menilai efektivitas pelayanan publik. Akun persediaan dapat dijadikan untuk menilai efektivitas pelayanan publik karena semakin banyak persediaan yang terpakai menunjukkan bahwa pemerintah melakukan pelayanan kepada publik secara efektif. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan komponen yang digunakan pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani publik. Semakin sedikit jumlah persediaan yang tersisa maka boleh dikatakan semakin efektif pelayanan yang telah diberikan. Akuntansi akrual juga bermanfaat untuk menilai efisiensi pelayanan kepada publik. Persediaan habis pakai merupakan persediaan yang digunakan pemerintah dalam melayani publik. Informasi persediaan dapat digunakan pemerintah untuk menilai apakah pembiayaan untuk pembelian persediaan telah menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa semakin banyak persediaan yang digunakan akan menghasilkan produk layanan yang lebih berkualitas.

#### ***Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara***

Akuntansi akrual bermanfaat untuk mengidentifikasi biaya yang diperlukan atas pelayanan kepada masyarakat. Aset pemerintah merupakan sumber daya yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Aset yang digunakan merupakan salah satu komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan adanya informasi aset, pemerintah dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan publik termasuk alat-alat atau aset yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah.

#### ***Penyusutan***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi. Akun penyusutan menunjukkan bahwa nilai suatu aktiva berkurang sesuai dengan masa manfaatnya. Dengan adanya informasi penyusutan, hal ini bisa menunjukkan keadaan aset tetap yang sesungguhnya. Dengan demikian informasi ini menjadi bermanfaat bagi pemerintah dalam melakukan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pengadaan aset tetap. Jika jumlah penyusutan suatu aset sudah mendekati nilai bukunya hal ini menunjukkan bahwa aset tetap tersebut akan habis masa manfaatnya. Informasi ini dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan investasi khususnya pada aset tetap.



### ***Utang***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam menilai kemampuan pemerintah untuk terus menyediakan pelayanan kepada publik. Utang merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka mendapatkan manfaat ekonomi untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya utang pemerintah dapat menjamin pelaksanaan penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dibiayai dengan kapasitas pemerintah dapat ditutupi dengan melakukan pinjaman berupa utang pada pihak ketiga maupun pemberi jasa sehingga pemerintah dapat tetap melakukan pelayanan terhadap publik.

### ***Beban (Beban Dibayar Dimuka)***

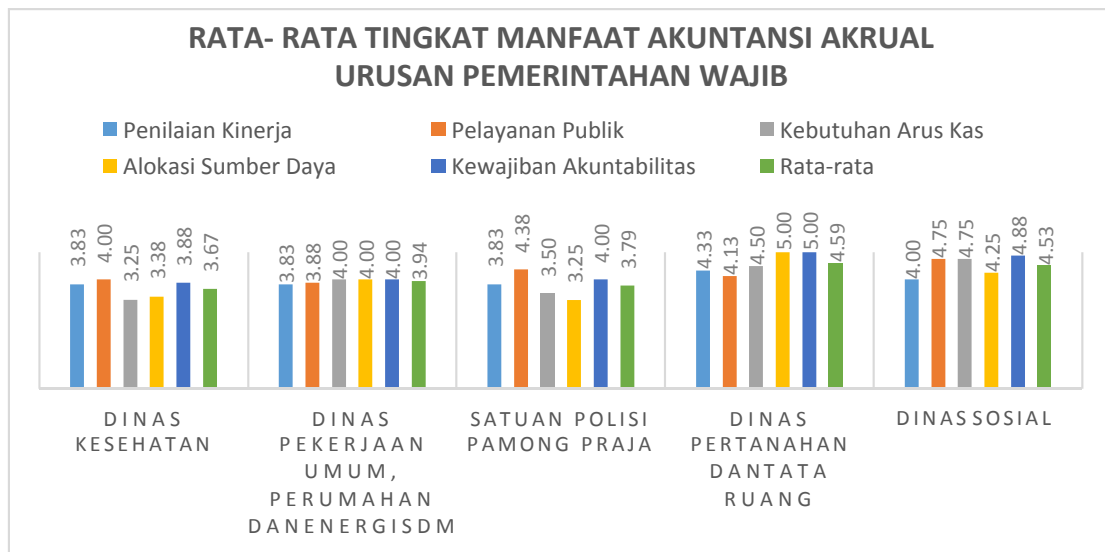
Akuntansi akrual bermanfaat dalam menilai efektivitas pelayanan publik. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan pemerintah, dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan dalam memberikan pelayanan publik. Keberhasilan pemerintah dapat dilihat dari jumlah biaya yang dikeluarkan termasuk beban dibayar dimuka. Semakin banyak beban yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mengindikasikan bahwa pemerintah telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Akuntansi akrual juga bermanfaat untuk menilai efisiensi pelayanan kepada publik. Akun beban merupakan jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya informasi beban dibayar dimuka, hal ini bermanfaat bagi pemerintah dalam menilai apakah biaya yang telah dikeluarkan telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin banyak beban yang dikeluarkan harusnya semakin baik pula kualitas pelayanan yang telah diberikan.

### ***Pendapatan (Pendapatan Diterima Dimuka)***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam menilai efektivitas pelayanan publik. Akun pendapatan diterima dimuka dapat digunakan pemerintah dalam menilai efektivitas pelayanan publik. Hal ini dikarenakan akun pendapatan termasuk pendapatan diterima dimuka merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah yang akan digunakan dalam pelayanan publik. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan akan berpengaruh pada kualitas pelayanan yang akan diberikan.

## **Tingkat Manfaat Akuntansi Akrua pada Masing-masing SKPD/OPD Urusan Pemerintahan Wajib**

Pemilihan SKPD/OPD pada pembahasan ini didasarkan pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Seluruh data pada masing-masing SKPD/OPD urusan pemerintahan wajib telah terkumpul kecuali pada Dinas Pendidikan. Data untuk Dinas Pendidikan tidak di dapatkan, hal ini karena masa disposisi surat belum selesai sampai batas akhir pengumpulan data. Berikut disajikan manfaat akuntansi akrual untuk masing-masing SKPD/OPD urusan pemerintahan wajib pada gambar 3.



Gambar 3. Rata-rata Tingkat Manfaat Akuntansi Akrua Urusan Pemerintahan Wajib

### Manfaat Akuntansi Akrua Pada Dinas Kesehatan

#### *Piutang*

Akuntansi akrua bermanfaat dalam menilai kemampuan Dinas Kesehatan untuk terus menyediakan pelayanan. Adanya akun piutang menunjukkan bahwa pelayanan pada Dinas Kesehatan berjalan dengan baik. Salah satu indikator kinerja dari Dinas Kesehatan adalah tersedianya pelayanan yang bermutu. Indikator kinerja diantaranya adalah peningkatan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas. Jawaban responden sejalan dengan keadaan di lapangan. Berdasarkan laporan kinerja instansi, indikator kinerja pelayanan bermutu telah melampaui target dengan realisasi 113,49% (LKJIP Dinkes, 2016).

#### *Persediaan/Barang Habis Pakai*

Akuntansi akrua bermanfaat dalam menilai efektivitas pelayanan publik. Akun persediaan dapat dijadikan untuk menilai efektivitas pelayanan publik karena semakin banyak persediaan yang terpakai menunjukkan bahwa pemerintah melakukan pelayanan kepada publik secara efektif. Hal ini berkaitan dengan salah satu tugas dan fungsi Dinas kesehatan yaitu sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, keamanan makanan termasuk pelayanan kefarmasian. Persediaan habis pakai seperti obat-obatan digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Jawaban responden tergambar dengan keadaan di lapangan, di mana pada indikator ini telah melewati target yang ditentukan dengan persentase realisasi sebesar 102,54% (LKJIP Dinkes, 2016).

#### *Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara*

Akuntansi akrua bermanfaat untuk mengidentifikasi biaya yang diperlukan atas pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya informasi aset, Dinas Kesehatan dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan publik.

Jika dikaitkan dengan salah satu tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, yaitu pengadaan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS dan jaringannya, akun aset dapat digunakan untuk mengidentifikasi sarana dan prasarana apa saja yang masih kurang atau perlu dilakukan perbaikan. Jawaban responden sejalan dengan keadaan di lapangan yang menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 104,94% atau pada kategori sangat baik (LKJIP Dinkes, 2016).

### ***Penyusutan***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi. Akun penyusutan menunjukkan bahwa nilai suatu aktiva berkurang sesuai dengan masa manfaatnya. Dengan demikian informasi ini menjadi bermanfaat bagi pemerintah dalam melakukan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pengadaan aset tetap. Salah satu tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah Pengadaan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS dan jaringannya. Jika dikaitkan dengan akun penyusutan, hal ini membantu Dinas Kesehatan untuk mengetahui keadaan aset yang sesungguhnya, dengan demikian Dinas Kesehatan dapat mengetahui Aset mana yang perlu diadakan ataupun yang perlu dilakukan pemeliharaan. Kejadian di lapangan menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 104,94% atau pada kategori sangat baik (LKJIP Dinkes, 2016).

### ***Utang***

Akuntansi akrual bermanfaat sebagai masukan dalam penyusunan anggaran. Jika dikaitkan dengan akun utang, hal ini bermanfaat dalam penyusunan anggaran pada Dinas Kesehatan karena utang merupakan kewajiban dinas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah pengadaan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS dan jaringannya. Pengadaan sarana dan prasarana bisa jadi dilakukan oleh pihak ketiga di mana pembayarannya bisa dilakukan pada masa mendatang. Dengan adanya informasi utang pemerintah dapat melakukan evaluasi berhubungan dengan penyusunan anggaran untuk periode berikutnya.

### ***Beban (Beban Dibayar Dimuka)***

Akuntansi akrual bermanfaat untuk menilai efisiensi pelayanan kepada publik. Dengan adanya informasi beban dibayar dimuka, hal ini bermanfaat bagi pemerintah dalam menilai apakah biaya yang telah dikeluarkan telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika dikaitkan dengan salah satu tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan, akun beban dibayar dimuka dapat digunakan untuk menilai apakah dengan membayar pelatihan dan Diklat dapat menambah mutu pelayanan kesehatan atau tidak. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan harusnya semakin menambah mutu pelayanan kepada masyarakat. Keadaan di lapangan menggambarkan bahwa capaian kinerja pada indikator ini belum mencapai target yaitu terealisasi sebesar 89,40% (LKJIP Dinkes, 2016).

### ***Pendapatan (Pendapatan Diterima Dimuka)***

Akuntansi akrual kurang bermanfaat dalam menilai kemampuan Dinas Kesehatan dalam menghasilkan kas. Akun pendapatan termasuk pendapatan diterima dimuka membantu pemerintah dalam mengetahui kemampuan menghasilkan kas. Salah satu tugas dan fungsi dinas kesehatan adalah sediaan jaminan dan pembiayaan kesehatan yang cukup. Dalam hal ini adalah peningkatan Rumah Sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jika dikaitkan dengan jawaban responden hal ini kurang bermanfaat karena pendapatan Rumah Sakit tidak bergantung pada APBN maupun APBD, sehingga akun pendapatan dinilai kurang bermanfaat dalam menilai kemampuan Dinas Kesehatan untuk menghasilkan kas.

### **Manfaat Akuntansi Akrual Pada Dinas Pekerjaan Umum**

#### ***Piutang***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam memprediksi kebutuhan kas. Dengan adanya informasi piutang Dinas PUP dan ESDM dapat memprediksi kebutuhan kas untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu tugas dan fungsi Dinas PUP dan ESDM adalah penyelenggaraan jasa konstruksi. Penyediaan jasa konstruksi untuk instansi lain bisa menimbulkan piutang apabila pembayarannya belum diselesaikan. Dengan adanya informasi piutang termasuk penyisihan piutang dinas dapat melakukan evaluasi terhadap piutang. Banyaknya piutang yang belum ditagih dapat dijadikan pertimbangan untuk memprediksi kebutuhan kas untuk masa mendatang.

#### ***Persediaan/Barang Habis Pakai***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam menilai efektivitas pelayanan publik pada Dinas PUP dan ESDM. Akun persediaan dapat dijadikan untuk menilai efektivitas pelayanan publik karena semakin banyak persediaan yang terpakai menunjukkan bahwa Dinas PUP dan ESDM melakukan pelayanan kepada publik secara efektif. Salah satu tugas dan fungsi Dinas PUP dan ESDM adalah penyelenggaraan jalan irigasi dan jaringan. Persediaan habis pakai pada Dinas PUP dan ESDM seperti material konstruksi digunakan untuk pembangunan jalan irigasi maupun jaringan. Semakin banyak persediaan yang digunakan berindikasi pada semakin efektifnya tugas dan fungsi Dinas PUP dan ESDM. Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa pengadaan jalan pada dinas telah melewati target dengan persentase realisasi sebesar 105,09% (LKPJ DIY, 2016).

#### ***Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam menilai kemampuan Dinas PUP dan ESDM untuk terus menyediakan pelayanan. Dengan adanya informasi aset, pemerintah dapat mengetahui ketersediaan aset yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apabila aset masih tersedia maka pemerintah akan tetap bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Tugas dan fungsi Dinas PUP dan ESDM salah satunya adalah penyelenggaraan jasa konstruksi. Alat berat merupakan salah satu aset Dinas PUP dan ESDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akun Aset membantu Dinas PUP

dan ESDM dalam menilai apakah aset masih tersedia untuk terus melaksanakan tugas dan fungsi dinas.

### ***Penyusutan***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi. Akun penyusutan menunjukkan bahwa nilai suatu aktiva berkurang sesuai dengan masa manfaatnya. Jika jumlah penyusutan suatu aset sudah mendekati nilai bukunya hal ini menunjukkan bahwa aset tetap tersebut akan habis masa manfaatnya. Tugas dan fungsi Dinas PUP dan ESDM sangat erat kaitannya dengan aset tetap yaitu pengadaan jalan, irigasi dan jaringan. Dengan demikian informasi penyusutan sangat bermanfaat dalam menilai kondisi jalan, irigasi dan jaringan untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang terjadi di lapangan sesuai dengan jawaban responden di mana realisasi pengadaan jalan melewati target dengan persentase 105,09% (LKPJ DIY, 2016).

### ***Utang***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam menilai kemampuan Dinas PUP dan ESDM untuk terus menyediakan pelayanan kepada publik. Utang merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka mendapatkan manfaat ekonomi untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dibiayai dengan kapasitas pemerintah dapat ditutupi dengan melakukan pinjaman berupa utang pada pihak ketiga maupun pemberi jasa sehingga Dinas PUP dan ESDM dapat tetap melakukan pelayanan terhadap publik. Seperti misalnya penyediaan jalan irigasi dan jaringan, Dinas PUP dan ESDM dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas PUP dan ESDM. Dengan demikian akun utang dapat digunakan untuk menilai apakah pelayanan pada Dinas PUP dan ESDM tetap berjalan dengan baik.

### ***Beban (Beban Dibayar Dimuka)***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam menilai efektivitas pelayanan publik. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan Dinas PUP dan ESDM, dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan dalam memberikan pelayanan publik. Keberhasilan pemerintah dapat dilihat dari jumlah biaya yang dikeluarkan termasuk beban dibayar dimuka. Beban yang dikeluarkan dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas seperti penyediaan akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni dapat menunjukkan efektivitas pelayanan dinas kepada masyarakat. Semakin banyak beban yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mengindikasikan bahwa pemerintah telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan terhadap penyediaan akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni pada Dinas PUP dan ESDM menunjukkan bahwa realisasi kinerja melampaui target dengan persentase diatas 100% (LKJP DIY, 2016).

### ***Pendapatan (Pendapatan Diterima Dimuka)***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam menilai kemampuan Dinas PUP dan ESDM dalam menghasilkan kas. Akun pendapatan termasuk pendapatan diterima dimuka membantu

Dinas PUP dan ESDM dalam mengetahui kemampuan menghasilkan kas. Pendapatan merupakan potensi kas yang diterima dari pihak ketiga yang akan digunakan kembali untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka semakin baik kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas. Tugas dan fungsi Dinas PUP dan ESDM salah satunya adalah penyelenggaraan jasa konstruksi. Penyediaan jasa konstruksi ini akan berpotensi menghasilkan pendapatan termasuk pendapatan diterima dimuka. Dengan demikian Dinas PUP dan ESDM dapat menggunakan akun pendapatan untuk menilai kemampuan dinas dalam menghasilkan kas.

### **Manfaat Akuntansi Akrual Pada Satuan Polisi Pamong Praja**

#### ***Piutang***

Akuntansi akrual bermanfaat sebagai masukan dalam penyusunan anggaran. Piutang merupakan potensi kas yang akan diterima pada masa akan datang. Dengan adanya informasi piutang, Satpol PP dapat menggunakan sebagai masukan dalam penyusunan anggaran karena piutang merupakan potensi kas yang bisa diperhitungkan sebagai tambahan anggaran pada periode berikutnya. Kegiatan Satpol PP dalam melakukan program dukungan terhadap instansi lain dapat berpotensi menghasilkan piutang. Informasi piutang dapat digunakan oleh Satpol PP sebagai masukan dalam penyusunan anggaran karena piutang dapat menghasilkan kas setelah jatuh tempo sehingga bisa dimasukkan sebagai penambah anggaran.

#### ***Persediaan/Barang Habis Pakai***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam menilai efektivitas pelayanan publik. Akun persediaan dapat dijadikan untuk menilai efektivitas pelayanan publik karena semakin banyak persediaan yang terpakai menunjukkan bahwa Satpol PP melakukan pelayanan kepada publik secara efektif. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan komponen yang digunakan Satpol PP untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan pengamanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Semakin sedikit jumlah persediaan yang tersisa maka boleh dikatakan semakin efektif pelayanan yang telah diberikan oleh Satpol PP. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk pengamanan ketertiban dan ketenteraman telah melawati target dengan realisasi 131,32% (LKJP DIY, 2016).

#### ***Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara***

Akuntansi akrual sangat bermanfaat dalam menilai kemampuan Satpol PP untuk terus menyediakan pelayanan. Salah satu hal yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah dengan tersedianya aset penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini karena dengan adanya informasi aset, pemerintah dapat mengetahui ketersediaan aset yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apabila aset masih tersedia maka pemerintah akan tetap bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Aset tetap yang digunakan oleh Satpol PP dalam penertiban seperti kendaraan merupakan sarana yang digunakan untuk pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya informasi aset Satpol PP dapat mengontrol ketersediaan kendaraan yang memadai.

### ***Penyusutan***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam mengidentifikasi biaya yang diperlukan dalam pelayanan terhadap publik. Aset tetap merupakan sarana penunjang yang digunakan oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Aset merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Aset tetap sendiri dibiayai menurut periode pemanfaatannya dalam akun biaya penyusutan dan diakumulasi pada akun akumulasi penyusutan. Dengan adanya informasi penyusutan ini pemerintah dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang terkait dengan aset dalam upaya pelayanan publik. Penyusutan aset tetap yang digunakan oleh Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban dan penenteraman masyarakat dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya yang telah dikeluarkan dalam pelayanan masyarakat.

### ***Utang***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam memastikan pengelolaan utang dan aset telah akuntabel. Informasi utang merupakan jumlah kewajiban Satpol PP yang harus diselesaikan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP sebagai instansi yang ditugaskan untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sangat memungkinkan dinas melakukan pinjaman yang membuat timbulnya utang. Dengan adanya informasi utang pada laporan keuangan akan bermanfaat bagi Satpol PP dalam memastikan bahwa pengelolaan utang telah dilakukan secara transparan sehingga hal ini menjadikan pelaporan pemerintah lebih akuntabel.

### ***Beban (Beban Dibayar Dimuka)***

Akuntansi akrual bermanfaat untuk menilai efisiensi pelayanan kepada publik. Dengan adanya informasi beban dibayar dimuka, hal ini bermanfaat bagi pemerintah dalam menilai apakah biaya yang telah dikeluarkan telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin banyak beban yang dikeluarkan harusnya semakin baik pula kualitas pelayanan yang telah diberikan. Biaya yang telah dikeluarkan oleh Satpol PP termasuk biaya dibayar dimuka dapat dijadikan acuan terhadap penilaian efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan mestinya semakin meningkatkan kepatuhan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk pengamanan ketertiban dan ketenteraman telah melawati target dengan realisasi 131,32% (LKJP DIY, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh Satpol PP telah efisien.

### ***Pendapatan (Pendapatan Diterima Dimuka)***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam membantu pelaksanaan kewajiban akuntabilitas pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata jawaban responden yaitu 4,00 atau berada pada kategori bermanfaat. Pendapatan diterima dimuka merupakan informasi penerimaan oleh Satpol PP namun manfaat yang diberikan belum digunakan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP ada kemungkinan dinas memperoleh pendapatan baik itu diterima langsung maupun berstatus diterima dimuka. Informasi



pendapatan maupun pendapatan diterima dimuka disajikan dalam laporan keuangan yang dengan demikian informasi ini membantu pemerintah dalam melaksanakan kewajiban akuntabilitas.

### **Manfaat Akuntansi Akrua Pada Dinas Pertanahan**

#### ***Piutang***

Akuntansi akrua bermanfaat dalam menilai kemampuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk terus menyediakan pelayanan. Jika dikaitkan dengan akun piutang hal ini berindikasi bahwa semakin banyak perputaran piutang menunjukkan bahwa pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berjalan secara terus menerus. Salah satu tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang berpotensi menghasilkan piutang adalah urusan administrasi pertanahan. Adanya akun piutang menunjukkan bahwa pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berjalan dengan baik. Berdasarkan jawaban responden dan dikaitkan dengan fungsi akun piutang, pada pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan pemerintah berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

#### ***Persediaan/Barang Habis Pakai***

Akuntansi akrua bermanfaat untuk menilai efisiensi pelayanan kepada publik. Informasi persediaan dapat digunakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk menilai apakah pembiayaan untuk pembelian persediaan telah menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah penataan ruang dan penertiban administrasi urusan pertanahan. Persediaan habis pakai pada dinas digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akun persediaan dapat digunakan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk mengevaluasi efisiensi pelayanan. Semakin banyak persediaan yang digunakan harusnya semakin meningkatkan kinerja penataan ruang dan penertiban administrasi urusan pertanahan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa indikator kinerja dinas terealisasi 100% atau lebih dengan kriteria sangat baik (LKJIP Dispertaru, 2017).

#### ***Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara***

Akuntansi akrua sangat bermanfaat dalam melakukan evaluasi terhadap alokasi sumber daya. Jika dikaitkan dengan akun aset, hal ini bermanfaat karena aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam penataan ruang dan urusan pertanahan, informasi aset sangat dibutuhkan dalam evaluasi terhadap penataan ruang dan urusan administrasi pertanahan. Informasi aset berupa tanah digunakan dalam pertimbangan terhadap penataan ruang dan administrasi pertanahan.

#### ***Penyusutan***

Akuntansi akrua bermanfaat. Akuntansi akrua bermanfaat dalam mengidentifikasi biaya yang diperlukan dalam pelayanan terhadap publik. Aset tetap merupakan sarana

penunjang yang digunakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Aset merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Aset yang digunakan oleh dinas dalam peningkatan kinerja dalam penataan ruang dan urusan administrasi tanah merupakan barang penunjang yang tiap tahunnya mengalami penyusutan. Adanya informasi penyusutan dapat membantu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam mengidentifikasi biaya yang digunakan dalam pelayanan publik.

### ***Utang***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam memastikan pengelolaan utang dan aset telah akuntabel. Informasi utang merupakan jumlah kewajiban pemerintah yang harus diselesaikan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bisa terjadi transaksi utang terhadap instansi lain. Dengan adanya informasi ini akan bermanfaat bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam memastikan bahwa pengelolaan utang telah dilakukan secara transparan sehingga hal ini menjadikan pelaporan pemerintah lebih akuntabel.

### ***Beban (Beban Dibayar Dimuka)***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam menilai efektivitas pelayanan publik. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan dalam memberikan pelayanan publik. Keberhasilan pemerintah dapat dilihat dari jumlah biaya yang dikeluarkan termasuk beban dibayar dimuka. Semakin banyak beban yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mengindikasikan bahwa pemerintah telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Beban yang ditanggung oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam pelayanan penataan ruang dan urusan administrasi pertanahan dapat digunakan untuk menilai apakah pelayanan sudah efektif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa indikator kinerja dinas terealisasi 100% atau lebih dengan kriteria sangat baik (LKJIP Dispertaru, 2017). Hal ini membuktikan bahwa beban yang dikeluarkan oleh dinas telah efektif.

### ***Pendapatan (Pendapatan Diterima Dimuka)***

Akuntansi akrual bermanfaat untuk menilai efisiensi pelayanan kepada publik. Akun pendapatan termasuk pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang telah diterima dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Akun pendapatan bermanfaat dalam menilai efisiensi pelayanan dinas dalam meningkatkan kinerja penataan ruang dan penyelenggaraan administrasi urusan pertanahan. Pelayanan Dinas yang efisien dapat diukur dengan adanya pendapatan yang diterima dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **Manfaat Akuntansi Akrua Pada Dinas Sosial**

### ***Piutang***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam memprediksi kebutuhan kas. Akun piutang merupakan potensi pendapatan yang bisa diperoleh pada masa mendatang. Dalam

menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dapat terjadi transaksi yang menimbulkan piutang baik itu pada pihak ketiga maupun pada instansi lain. Dengan adanya informasi piutang, Dinas Sosial dapat memprediksi kebutuhan kas untuk memenuhi kebutuhan dinas. Jika dikaitkan dengan jawaban responden akun piutang bermanfaat dalam memprediksi kebutuhan kas karena piutang merupakan potensi pendapatan kas di masa mendatang.

#### ***Persediaan/Barang Habis Pakai***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam mengidentifikasi biaya yang diperlukan untuk pelayanan publik. Persediaan dapat digunakan dalam mengidentifikasi biaya terhadap pelayanan karena persediaan merupakan komponen yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kaitannya pelayanan Dinas Sosial. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam hal peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesejahteraan, akun persediaan sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi biaya yang diperlukan dalam pelayanan kesejahteraan. Persediaan yang tidak tersisa menunjukkan pelayanan kualitas hidup dan kesejahteraan berjalan dengan baik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Sosial telah melewati target dengan realisasi di atas 100% (LKPD DIY, 2016).

#### ***Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara***

Akuntansi akrual sangat bermanfaat dalam menilai kemampuan Dinas Sosial untuk terus menyediakan pelayanan. Salah satu hal yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah dengan tersedianya aset penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan adanya informasi aset, pemerintah dapat mengetahui ketersediaan aset yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Aset merupakan barang penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu akun aset bermanfaat dalam menilai kemampuan Dinas Sosial untuk terus menyediakan pelayanan.

#### ***Penyusutan***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam mengidentifikasi biaya yang diperlukan dalam pelayanan terhadap publik. Aset tetap merupakan sarana penunjang yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Aset merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Penyusutan aset yang digunakan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat merupakan biaya yang harus dihitung terhadap pelayanan kepada masyarakat. Akun penyusutan membantu Dinas Sosial dalam mengidentifikasi biaya yang diperlukan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

#### ***Hutang***

Akuntansi akrual bermanfaat sebagai masukan dalam penyusunan anggaran. Jika dikaitkan dengan akun utang, hal ini bermanfaat dalam penyusunan anggaran Dinas Sosial karena utang merupakan kewajiban dinas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu

yang pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, memungkinkan transaksi utang terjadi. Adanya informasi utang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan anggaran. Anggaran pada masa mendatang perlu mempertimbangkan jumlah utang yang harus diselesaikan.

#### ***Beban (Beban Dibayar Dimuka)***

Akuntansi akrual sangat bermanfaat untuk menilai efisiensi pelayanan kepada publik. Dengan adanya informasi beban termasuk beban dibayar dimuka, hal ini bermanfaat bagi Dinas Sosial dalam menilai apakah biaya yang telah dikeluarkan telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesejahteraan sosial. Semakin banyak beban yang dikeluarkan termasuk beban dibayar dimuka harusnya semakin meningkat kualitas hidup dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Sosial telah melewati target dengan realisasi di atas 100% (LKPJ DIY, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Dinas Sosial kepada masyarakat telah efisien.

#### ***Pendapatan (Pendapatan Diterima Dimuka)***

Akuntansi akrual bermanfaat dalam menilai efektivitas pelayanan pada Dinas Sosial. Tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan Dinas Sosial juga memperoleh pendapatan dari pihak lain. Akun pendapatan termasuk pendapatan diterima dimuka dapat digunakan dinas untuk menilai efektivitas pelayanan publik. Hal ini dikarenakan akun pendapatan termasuk pendapatan diterima dimuka merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh pemerintah yang akan digunakan dalam pelayanan publik.

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Berdasarkan hasil penelitian semua indikator yang disajikan pada penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi akrual bermanfaat. Rata-rata jawaban responden berada pada angka di atas 4,00 dari skala 1 sampai 5 dengan kategori bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi akrual bermanfaat dalam internal Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari kelima indikator yang ada, kewajiban akuntabilitas merupakan indikator yang rata-ratanya paling tinggi yakni 4,30. Hal ini juga sejalan dengan tujuan diberlakukannya akuntansi akrual yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Pada penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa akuntansi akrual lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan akuntansi sebelum akrual (Hoek, M.P. van der. (2005), Kober et al (2010), Andriani et al (2010), Sousa et al (2012)). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil rata-rata manfaat di atas 4 dari skala 1-5. Temuan ini bertentangan dengan argumen yang disajikan dalam literatur bahwa akuntansi akrual tidak memenuhi kebutuhan informasi manajer sektor publik (misalnya, Carnegie dan Wolnizer 1995; 1997; 1999; 2002; Barton 2002; 2004; 2005; Carlin 2005). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa akuntansi akrual lebih bermanfaat jika

dibandingkan dengan basis akuntansi lainnya. Hasil pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana pada penelitian terdahulu manfaat akuntansi akrual disimpulkan dengan membandingkan antara manfaat basis akuntansi yang lain. Pada penelitian ini, manfaat akuntansi akrual disimpulkan dengan menentukan jawaban responden dengan kategori dari sangat tidak bermanfaat sampai kategori sangat bermanfaat. Jawaban responden kemudian dideskripsikan berdasarkan keadaan dan fakta-fakta yang ada.

Teori akuntansi positif digunakan dalam menjelaskan hasil penelitian. Penerapan akuntansi basis akrual pada pemerintah provinsi DI Yogyakarta merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pengambilan keputusan. Pemilihan basis akuntansi ini mampu menjawab kebutuhan manajer sektor publik untuk pengendalian internal pemerintahan. Teori akuntansi positif berkaitan dengan prediksi tindakan sebagaimana pilihan atas kebijakan akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana manajer akan merespons terhadap akuntansi baru tersebut. Dalam penelitian ini terbukti bahwa pemilihan basis akuntansi yang baru berdampak baik terhadap pemerintah. Sehingga teori akuntansi positif merefleksikan keadaan pada instansi di pemerintahan, yaitu dengan penerapan akuntansi akrual pemerintah dapat mengawasi manajer sektor publik dengan baik. Dengan demikian tidak perlu dilakukan modifikasi terhadap teori.

Akun-akun baru pada akuntansi akrual membantu SKPD/OPD dalam mengakselerasi kinerja. Hal ini dilakukan dengan cara mengevaluasi kinerja berdasarkan keadaan keuangan yang sesungguhnya. Dengan adanya akun-akun akrual pemerintah mendapatkan tambahan informasi baru. Informasi-informasi yang disajikan oleh akun-akun akrual merupakan pengalokasian berdasarkan periode yang bersangkutan. Sehingga SKPD/OPD dapat menggunakan informasi ini membantu dalam melakukan evaluasi. Berdasarkan penjelasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, keadaan pada pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan teori akuntansi positif. Sehingga dapat membantu dalam pengembangan kinerja dimana pengelolaan keuangan yang baik bisa membantu pemerintah dalam mengawasi manajer sektor publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y., Kober, R., & Ng, J. (2010). *Decision Usefulness of Cash and Accrual Information: Public Sector Managers Perceptions*. <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2010.00087>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016*.
- Barrett, P. 1993. *Managing in an Accrual Accounting Environment*. RIPA Public Sector Conference (February, Canberra).
- Barrett, P. 2004. *Financial Management in the Public Sector-How Accrual Accounting and Budgeting Enhances Governance and Accountability*. Speech presented at The

- Challenge of Change: Driving Governance and Accountability. CPA Forum (Singapore, August, Australian National Audit Office).
- BPK RI. 2012. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012. BPK RI. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013.
- Bpkp.go.id. 2016. *Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/1858/LAKIP-PEMERINTAH-DAERAH.bpkp>
- Carlin, T.M. 2005. *Debating the Impact of Accrual Accounting and Reporting in the Public Sector*. Financial Accountability and Management. pp. 309-336.
- Cnnindonesia.com. 2015. *Setelah 12 Tahun, Pemerintah Mulai Terapkan Pencatatan Akrual*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150304115623-78-36596/setelah-12-tahun-pemerintah-mulai-terapkan-pencatatan-akrual>
- Ekonomi.kompas.com. 2010. *Peluang Korupsi Kian Dipersempit*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2010/08/06/08503793/Peluang.Korupsi.Kian.Dipersempit>
- Evans, M. 1995. *A Change for the Better?*. Accountancy. Vol. 115 (February). pp. 92-94.
- Gillibrand, A. and B. Hilton 1998. *Resource Accounting and Budgeting: Principles, Concepts and Practice - the MOD Case*. Public Money & Management. Vol. 18. No. 2. pp. 21-28.
- Godfrey, Jayne M., Allan Hodgson, Ann Tarca, Jane Hamilton, dan Scott Holmes. 2010. *Accounting Theory, 7th Edition*. John Wiley & Sons Australia, Ltd, Milton Old 4064.
- Guthrie, J. 1993. *Australian Public Sector Accounting: Transformations and Managerialism*. Accounting Research Journal. Vol. 6. No. 2. pp. 15-25.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Akuntansi Sektor Publik edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, J. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Heald, D. and A. Dowdall 1999. *Capital Charging as a VFM Tool in Public Services*. Financial Accountability & Management. Vol. 15. No. 3&4. pp. 229-45.
- Hoek, M.P. van der. 2005. *From Cash to Accrual Budgeting and Accounting in the Public Sector: The Dutch Experience*. Public Budgeting and Finance (Spring). pp. 32-45.
- IFAC 2015. IAS 1. Presentation of Financial Statements, didownload dari <http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2015/ias01.pdf>
- International Public Sector Accounting Standards Board. 2011. *Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities- Third Edition*. International Federation of Accountants. New York. (diakses dari [www.ifac.org](http://www.ifac.org))
- Jones, S. and N. Puglisi 1997. *The Relevance of AAS 29 to the Australian Public Sector: A Case for Doubt?*. Abacus. Vol. 33. No. 1. pp. 115-32.
- Kober, R., Lee, J., & Ng, J. 2010. *Mind your accruals: perceived usefulness of financial information in the australian public sector under different accounting systems*. Financial Accountability & Management. Vol 26. No. 3. pp. 267-297.



- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, 2016. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 2017. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Laporan Kinerja Pemerintah, 2016. Dinas Kesehatan. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ma, R. and R. Matthews 1992. *What's Wrong with ED 55*. Financial Forum (ASCPA, Melbourne, November). p. 5.
- McCrae, M. and M. Aiken 1994. *AAS 29 and Public Sector Reporting: Unresolved Issues*. Australian Accounting Review. Vol. 4. No. 2. pp. 65-72.
- Mellett, H. 1997. *The Role of Resource Accounting in the U.K Government's Quest for Better Accounting*. Accounting and Business Research. Vol. 27. No. 2. pp. 157-68.
- Mellor, T. 1996. *Why Governments Should Produce Balance Sheets*. Australian Journal of Public Administration. Vol. 13. pp. 231-54.
- Mir, Monir. Harun, Harun. Sutiyono Wahyu. 2018. *Evaluating the Implementation of a Mandatory Dual Reporting System: The Case of Indonesian Local Government*. Australian Accounting Review.
- OECD Journal on Budgeting Vol. 3. No.1 Tahun 2003.
- Pallot, J. 2001. *A Decade in Review: New Zealand's Experience with Resource Accounting and Budgeting*. Financial Accountability & Management. Vol. 17. No. 4. pp. 383-400.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rowles, T. 1991. *Infrastructure and Heritage Asset Accounting*. Australian Accountant (July). pp. 69-73.
- Ryan, C. 1998. *The Introduction of Accrual Reporting Policy in the Australian Public Sector: An Agenda Setting Explanation*. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 11. No. 5. pp. 518-39.
- Simanjuntak, Binsar. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. Disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Talbot, C. 1998. *Output and Performance: Time to Open Up the Debate*. Public Money & Management. Vol. 18. No. 2. pp. 4-5.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Walker, R. 1988. *Accrual Accounting*. Report of the Proceedings of the Accrual Accounting
- Seminar, NSW PAC Report 38 (Government Printer, Sydney).
- Watts and Zimmerman, 1990. *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*. The Accounting Review. Vol. 65. Pp. 131-156.